

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN NOTARIS UNTUK MENJALANKAN JABATANNYA DALAM BENTUK PERSEKUTUAN PERDATA

Oleh

Ghea Tivanny¹ dan Irna Nurhayati²

INTISARI

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis ketidaksesuaian konsep persekutuan perdata yang diatur UUJN-P dengan konsep persekutuan perdata yang diatur dalam KUHPperdata dan penggunaan terminologi yang tepat mengenai suatu wadah bagi notaris yang menjalankan jabatannya bersama-sama dalam satu kantor menurut UUJN-P.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan data sekunder sebagai sumber data yang didukung dengan penelitian di lapangan untuk melakukan wawancara dengan responden dan narasumber. Cara pengumpulan data dalam penelitian hukum ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan untuk memperoleh data sekunder. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil analisis tersebut dipaparkan secara deskriptif sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep persekutuan perdata menurut KUHPperdata adalah menjalankan suatu kegiatan usaha atau badan usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan, sedangkan konsep persekutuan perdata yang dimaksud dalam UUJN-P adalah kantor bersama notaris, dalam menjalankan jabatannya Notaris lebih mengutamakan pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini menjadi tidak relevan dengan tujuan Persekutuan Perdata yang diatur dalam KUHPperdata. Penggunaan terminologi/istilah yang lebih tepat adalah Kantor Bersama Notaris maka dengan menggunakan terminologi/istilah kantor bersama Notaris tidak akan menimbulkan salah penafsiran.

Kata kunci : Notaris, Persekutuan Perdata, Kantor Bersama

¹ Mahasiswi Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

***JURIDICAL STUDY OF THE PROVISION ON NOTARY
TO IMPLEMENT NOTARY'S AUTHORITY
IN THE FORM OF PARTNERSHIP***

By

Ghea Tivanny³ and Irna Nurhayati⁴

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out and analyze the concept of civil partnership disagreement regulated by UUJN-P with the concept of peddling fellowship regulated in the Civil Code and the use of appropriate terminology regarding a forum for notaries who carry out their positions together in one office according to UUJN-P.

This research is empirical normative research with secondary data as a data source supported by research in the field to conduct interviews with respondents and resource persons. The method of collecting data in legal research is done through library research and field research to obtain secondary data. The data obtained in this study were analyzed using qualitative methods.

The results of the analysis are presented descriptively so that the description of the results of research that is dexcriptive-qualitative is presented. The results of the study indicate that the concept of civil partnership according to the Civil Code is to run a business activity or business entity that aims to obtain profits, while the concept of civil partnership referred to in UUJN-P is an office with a notary, in carrying out his position. This becomes irrelevant to the objectives of the Civil Society Alliance stipulated in the Civil Code. The use of terminology / terms that are more appropriate is a Joint Office of Notary, so using terminology / terms of office with a Notary will not cause misinterpretation.

Keywords : Notary, Civil Partnership, Joint Office

³ A Student of Postgraduate Program in Master Notary at Gadjah Mada University.

⁴ A Lecturer Faculty of Law at Gadjah Mada University.